

# BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN



## 5.1. VISI

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri nomer 54 tahun 2010, maka visi RPJMD menggunakan visi gubernur dan wakil gubernur terpilih yang telah dilantik. Dengan demikian Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:

**“Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”**

Posisi Visi untuk tahun 2016-2021 atau jangka menengah ini, dalam skenario jangka panjang nasional 2005-2025, berada pada periode RPJM Nasional tahapan ke III (2016-2019) yang berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke II. Dinyatakan dalam RPJPN, tahapan periode pembangunan ke III ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Beberapa butir arahan lainnya berupa upaya untuk mewujudkan kondisi aman dan damai yang makin mantap; kehidupan yang makin demokratis; memantapkan kesadaran dan penegakan hukum; meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk kualitas sumber daya manusia; memantapkan pembangunan berkelanjutan; menguatkan daya saing perekonomian; meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang termasuk pengembangan infrastruktur perdesaan.

Mempertimbangkan beberapa butir penting tersebut maka pernyataan visi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Mandiri:** Inti dari bagian visi Mandiri adalah terjadinya proses pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan Kalimantan Utara sebagai wilayah yang mandiri.

Sebagai provinsi yang dicita-citakan mandiri, diharapkan akan mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.

Kemandirian tidak berarti mengisolasi diri melainkan tetap memahami saling ketergantungan dengan daerah lain dalam hubungan yang saling mengisi dan bersifat proaktif. Beberapa permasalahan penting yang terkait dengan kemandirian ini adalah pemenuhan kebutuhan pangan dan energi serta aspek pembangunan lainnya dengan penekanan pada aspek sumber daya manusia menuju Kalimantan Utara yang adil dan makmur. Keadilan dan kemakmuran diupayakan terjadi pada semua aspek kehidupan. Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara diupayakan memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

- b. **Aman dan Damai:** bagian dari visi ini mengarahkan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah dengan kondisi **perpaduan kemajemukan** masyarakat yang aman dan damai untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara demografis, masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara merupakan perpaduan dari berbagai etnis baik yang merupakan penduduk asli maupun pendatang yang pada saat ini dan masa mendatang harus bahu membahu memajukan daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. Kemajemukan ini haruslah diarahkan untuk menjadi potensi pembangunan yang kondusif dengan menjaga suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat dan keragaman kemampuan. Secara geografis Kalimantan Utara merupakan serambi depan bangsa yang berhadapan dengan negara lain, oleh karena itu suasana aman dan terjaganya keutuhan wilayah NKRI menjadi salah satu yang penting untuk diwujudkan. Pertahanan dan keamanan NKRI merupakan urusan yang secara yuridis formil menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun Provinsi

Kalimantan Utara haruslah juga berupaya menciptakan keamanan wilayah sesuai tugas dan kewenangannya karena dampak keamanan wilayah akan langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Demikian pula sebagai daerah yang termasuk berjarak cukup jauh dari pemerintahan pusat, penegakan hukum sesuai ketentuan juga harus diwujudkan untuk mendukung suasana aman dan damai masyarakat Kalimantan Utara.

- c. **Pemerintahan yang bersih dan berwibawa:** bagian dari visi ini mengarahkan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki pemerintahan bersih, transparan dan akuntabel. Sebagai propvinsi yang baru, Kalimantan Utara harus memulai dengan dasar yang baik, oleh karena itu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa menjadi penting untuk diwujudkan. Pemerintahan yang bersih dan kemudian berdampak pada kewibawaan menjadi upaya perwujudan pondasi dibangunnya Provinsi Kalimantan Utara yang maju dan baik di masa depan. Dimensi lain yang harus diwujudkan dalam membuat pemerintahan yang berwibawa adalah dihadirkannya sosok pemerintahan daerah berupa berbagai sarana dan prasarana serta kemudahan untuk melayani masyarakat Kalimantan Utara.

## 5.2. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan beserta berbagai butir penjelasannya, maka dirumuskan misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mewujudkan visi **Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa** yang telah ditetapkan, ada tiga misi yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan yaitu:

1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri
2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai
3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa

### 5.2.1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri

Misi yang pertama, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri secara umum mengandung arti dilakukannya upaya menciptakan kondisi yang tidak menggantungkan kepada berbagai pihak lain, kondisi yang lebih dekat dengan cita-cita pembangunan nasional.

Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting yang selama lima tahun mendatang harus dicapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri antara lain: upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan, dan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Bagian dari misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan diarahkan untuk menciptakan kondisi berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah. Bagian dari misi untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan mengandung makna meningkatkan perekonomian masyarakat sebesar-besarnya tanpa mengorbankan tingkat keberlanjutannya (*sustainability*). Upaya ini akan dipertajam dengan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (*green economy*); artinya diharapkan ada hasil pembangunan ekonomi yang berharga untuk dimeratakan. Upaya yang lainnya diarahkan untuk mencapai kondisi dengan infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah yang meningkat sejalan dengan pemahaman umum bahwa prasyarat kemajuan perekonomian wilayah adalah tersedianya sarana dan prasarana perekonomian wilayah. Upaya penting lainnya yang diperlukan adalah meningkatkan konektivitas Kalimantan Utara dengan daerah lainnya dan dengan negara tetangga. Upaya penting lain yang diperlukan untuk mengiringi peningkatan perekonomian wilayah adalah upaya mencapai meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Bagian dari misi untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia tak bisa dilepaskan dari berbagai upaya meningkatkan kinerja wilayah dalam berbagai aspek. Hasil pembangunan yang dilakukan di Kalimantan Utara harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu upaya ini harus mengandung upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada di Kalimantan Utara. Penajaman upaya ini adalah meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

### **5.2.2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai**

Misi yang kedua, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai, secara umum mengandung arti terciptanya kondisi yang menenteramkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari tanpa terganggunya kondisi keamanan dan kedamaian di seluruh wilayah provinsi.

Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait keamanan dan kedamaian wilayah yang selama lima tahun mendatang harus tercapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai antara lain: menjaga kedaulatan negara, dan mewujudkan penegakan hukum. Pertahanan dan keamanan memang merupakan tugas dari pemerintah pusat, namun tanpa mengesampingkan ketentuan formal yang ada keamanan wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan perlu diciptakan karena dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat setempat. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu mendukung penciptaan suasana aman dan damai ini sesuai dengan peran seperti yang diatur dalam ketentuan yang ada.

Bagian dari misi untuk menjaga kedaulatan negara diarahkan untuk daerah perbatasan dan wilayah secara keseluruhan. Di perbatasan diupayakan untuk mendukung kemudahan terjaganya keutuhan NKRI sedangkan di wilayah keseluruhan diarahkan untuk menjaga keamanan secara umum. Sedangkan bagian dari misi untuk membangun perbatasan yang aman diarahkan untuk mewujudkan daerah perbatasan yang tertib dan tenteram.

Bagian dari misi untuk mewujudkan penegakan hukum diarahkan pada upaya untuk mewujudkan penegakan hukum dengan cara menyiapkan berbagai ketentuan untuk menjadi dasar penegakan hukum dan melakukan berbagai implementasi ketentuan tersebut dikegiatan nyata di lapangan

### **5.2.3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa**

Misi yang ketiga yaitu mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa, secara umum mengandung arti mengupayakan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai kondisi yang harus terwujud untuk landasan mewujudkan visi lima tahun ke depan. Secara khusus misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam arti bersih dan berwibawa selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya

utama untuk mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa antara lain: mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel diarahkan pada upaya mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas serta mewujudkan pemerintahan akuntabel.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pelayanan publik yang prima diarahkan pada penguatan suasana pemerintahan yang menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik, upaya terwujudnya pelayanan perizinan yang selalu meningkat dan meningkatnya pelayanan kependudukan

### **5.3. TUJUAN DAN SASARAN**

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan komposisi kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis dalam penyusunan RPJMD.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Berdasarkan visi, misi, dan isu strategis yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan tujuan dari ketiga misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara adalah seperti berikut.

#### **A. Tujuan untuk melaksanakan upaya Misi I: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri**

Tujuan yang merupakan penjabaran dari misi pertama ini diarahkan untuk terwujudnya kondisi penting dalam rangka mencapai visi kemandirian daerah. Untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri, tiga penjabaran misi yang harus dilakukan antara lain: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan, dan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

### **A.1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

Dalam mengupayakan kemandirian daerah maka Provinsi Kalimantan Utara harus memiliki masyarakat yang sejahtera. Dengan kesejahteraan yang memadai diharapkan tidak terlalu tergantung pada daerah atau wilayah lainnya sehingga bisa mandiri. Perwujudan masyarakat yang sejahtera akan diarahkan untuk mengurangi kondisi berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan pengurangan kemiskinan akan lebih nyata dan terasa peningkatan kesejahteraan masyarakat disamping berbagai upaya pendukung lainnya.

- a) Pengurangan angka kemiskinan sebagai penanda berkurangnya kondisi kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah perlu diawali dengan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat, serta upaya peningkatan kelompok rentan miskin.
- b) Pengurangan angka pengangguran sebagai penanda lain dari kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, diawali dengan upaya peningkatan perluasan lapangan kerja, upaya peningkatan investasi dan teknologi yang diarahkan pada investasi dan teknologi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, serta upaya peningkatan kualitas ketrampilan masyarakat dari kelompok berpenghasilan rendah.

### **A.2. Meningkatkan Perekonomian Rakyat yang Berkelanjutan**

Sebagai bagian dari upaya memandirikan Provinsi Kalimantan Utara, tujuan ini mengandung makna meningkatkan perekonomian masyarakat sebesar-besarnya tanpa mengorbankan tingkat keberlanjutannya (*sustainability*). Perwujudan peningkatan perekonomian rakyat yang berkelanjutan akan diawali dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (*green economy*) dan meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Dengan peningkatan pertumbuhan dan sarana prasarana perekonomian wilayah yang ditekankan pada perekonomian masyarakat dan bersifat berkelanjutan, akan lebih tersedia berbagai kemudahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat disamping berbagai upaya pendukung lainnya.

- a) Peningkatan angka pertumbuhan ekonomi sebagai penanda meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara umum di masyarakat perlu diawali dengan upaya peningkatan infrastruktur fisik pertanian, upaya peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian, upaya peningkatan pemanfaatan lahan pertanian, upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pertanian, upaya peningkatan pengelolaan dan kelembagaan perekonomian rakyat, upaya peningkatan pengelolaan perikanan

budidaya dan perikanan tangkap, upaya peningkatan produktivitas perikanan budidaya, upaya peningkatan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, upaya peningkatan daya tarik pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan, upaya peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan kepariwisataan, upaya pengembangan sistem informasi manajemen dan pemasaran pariwisata, upaya peningkatan produksi pertambangan, upaya peningkatan kualitas hasil pertambangan, peningkatkan SDM pertambangan, upaya peningkatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan, serta upaya peningkatan teknologi pengembangan ekonomi yang berdaya saing.

- b) Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah merupakan cara untuk meningkatkan perekonomian wilayah. Peningkatan infrastruktur ini perlu diawali dengan upaya pengendalian sistem penataan ruang wilayah yang terintegrasi sehingga indikasi programnya terlaksana dan rencana struktur ruang dapat terwujud; upaya pengembangan sarana prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara yang secara riil akan memudahkan pengembangan perekonomian wilayah; upaya pembangunan infrastruktur dasar wilayah seperti air baku, air minum, fasilitas permukiman, dan lainnya yang terkait; serta upaya penyediaan sarana prasarana fisik energi sebagai upaya keterjaminan tersedianya energi yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi wilayah
- c) Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga juga merupakan arah pembangunan yang dituju untuk memudahkan pengembangan perekonomian daerah. Peningkatan konektivitas ini diharapkan dapat dicapai dengan upaya peningkatan prasarana jalan dan transportasi internal provinsi dan antar negara yang keduanya mendukung kegiatan perekonomian intra wilayah dan antar wilayah -- bahkan antar negara -- yang sangat diperlukan dalam pengembangan perekonomian wilayah; sangat diperlukan juga upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa komunikasi dan informatika untuk percepatan pengembangan perekonomian rakyat yang merupakan bagian pengembangan perekonomian daerah secara keseluruhan.
- d) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup harus dikedepankan dalam pengembangan perekonomian daerah. Arah pembangunan ini penting untuk mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi di masa selanjutnya. Jadi walaupun diusahakan terjadinya peningkatan perekonomian wilayah, tetap tidak mengesampingkan pertimbangan aspek keberlanjutan. Harapan ini akan dicapai melalui upaya

peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup; dan upaya peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan yang berkelanjutan

### **A.3. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Unsur sumber daya manusia sangat penting dalam meningkatkan kemandirian daerah. Peningkatan daya saing sumber daya manusia merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja wilayah dalam berbagai aspek dan untuk memastikan bahwa hasil pembangunan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Penajaman upaya ini diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dengan pendidikan dan kesehatan yang memadai akan mendukung daya saing sumberdaya manusia dan diharapkan pada gilirannya kehandalan SDM ini akan mendukung pencapaian kemandirian daerah.

- a) Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat direncanakan dicapai melalui upaya peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan menengah yang berkualitas; upaya peningkatan proses pendidikan, mutu tenaga pendidik dan kependidikan menengah, yang benar-benar bebas gratifikasi; juga pendidikan luar biasa di wilayah perkotaan, pedalaman, pesisir dan perbatasan; demikian pula upaya peningkatan minat baca; peningkatan pelestarian dan pemahaman serta apresiasi sejarah, seni dan budaya daerah dalam memperkuat tradisi ketahanan keragaman; upaya peningkatan partisipasi pemuda, keolahragaan, pencegahan masalah narkoba, dan peningkatan sarana prasarana keolahragaan di seluruh wilayah perkotaan, pedalaman, pesisir dan perbatasan
- b) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat direncanakan melalui berbagai upaya terkait peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat; upaya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, sarana-prasarana kesehatan dan proses pelayanan kesehatan; upaya pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana serta pembangunan keluarga melalui ketahanan keluarga

## **B. Tujuan untuk melaksanakan upaya misi II: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai**

Misi kedua ini dijabarkan kedalam upaya-upaya yang mendukung terjaganya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penegakan hukum. Kedua hal ini penting dalam rangka mewujudkan visi keamanan daerah dan suasana yang damai. Oleh

karena itu dirumuskan berbagai hal yang harus dilakukan untuk menjabarkan misi ke dua ini antara lain menjaga kedaulatan negara dan mewujudkan penegakan hukum.

### **B.1. Menjaga Kedaulatan Negara**

Kewenangan tentang pertahanan dan kemanan dalam menjaga kedaulatan negara sesuai ketentuan yang berlaku memang bukan tugas pokok pemerintahan provinsi, namun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain tetap perlu berperan untuk mendukung kedaulatan negara sesuai dengan peran provinsi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Sedangkan di wilayah keseluruhan diarahkan untuk mendukung penciptaan keamanan dan ketertiban wilayah.

- a) Peningkatan terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan upaya peningkatan sistem penjagaan kedaulatan negara sehingga terwujud sistem yang terpadu antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota beserta perangkatnya sesuai peran dan kewenangan masing-masing; upaya penguatan implementasi kerjasama antar negara sebagai upaya menjaga kedaulatan secara kooperatif dan bukan yang konfrontatif; upaya peningkatan peran desa perbatasan dalam menjaga keutuhan NKRI dengan lebih meningkatkan kesadaran kebangsaan dan sebagai bagian dari NKRI melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan yang memperkuat nuansa kehadiran negara dan pemerintah terutama di daerah perbatasan.
- b) Peningkatan terjaganya keamanan wilayah baik secara umum maupun terkait dengan kemajemukan masyarakat Kalimantan Utara, dilakukan dengan upaya peningkatan pencegahan, penanganan, gangguan kemanan beserta pembinaan pasca gangguan keamanan.

### **B.2. Membangun Daerah Perbatasan yang Aman**

Perbatasan merupakan salah satu keunikan dari Provinsi Kalimantan Utara dengan terbentangya 1.038 kilometer garis perbatasan. Oleh karena itu menuju kondisi terbangunnya daerah perbatasan yang aman adalah unsur penting dalam membangun Kalimantan Utara yang aman dan damai. Penjabaran lebih lanjut berupa upaya untuk mewujudkan sasaran berupa daerah perbatasan yang tertib dan tentram. Secara lebih rinci hal ini diarahkan untuk menguatkan strategi fasilitasi perwujudan wilayah perbatasan yang mendukung wilayah yang tertib dan tentram dengan arahan meningkatkan kondisi tertib dan aman di wilayah perbatasan; meningkatkan koordinasi antar lembaga yang mendukung

wilayah perbatasan yang tertib dan aman; serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang tertib dan aman

### **B.3. Mewujudkan Penegakan Hukum**

Kewenangan terkait penegakan hukum dan perundangan yang menjadi kewenangan dan tugas daerah diutamakan pada regulasi yang berlaku di daerah seperti yang diatur dalam ketentuan yang ada. Untuk mewujudkan penegakan hukum diarahkan pada upaya menyiapkan berbagai ketentuan penegakan hukum dan implementasi ketentuan tersebut di lapangan. Berbagai hal untuk mencapai tujuan ini adalah dengan meningkatkan upaya terkait kelengkapan dan intensitas pemanfaatan ketentuan, sumberdaya dan sarana penegakan hukum lainnya; serta upaya perwujudan aturan penegakan hukum yang memadai mulai dari peraturan daerah, peraturan kepala daerah samapai dengan aturan pelaksanaannya.

## **C. Tujuan untuk melaksanakan misi III: Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa**

Tujuan yang merupakan penjabaran dari misi ketiga ini diarahkan untuk terciptanya kondisi penting dalam rangka mewujudkan visi Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Berkenaan dengan kondisi Provinsi Kalimantan Utara dan visi yang ada, untuk penjabarannya perlu dilakukan dua hal utama, yang pertama adalah pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, dan hal yang kedua adalah pelayanan publik yang prima

### **C.1. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel**

Dalam mengupayakan praktek pemerintahan yang baik (*good governance*) maka Provinsi Kalimantan Utara harus memiliki pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Jika kondisi pemerintahan yang dituju ini bisa dicapai, maka dapat diharapkan akan terjadi proses percepatan pencapaian tujuan dari misi pertama dan kedua yang pada waktunya akan lebih mendekatkan pada visi pembangunan lima tahun mendatang. Perwujudan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel memerlukan dua upaya pembangunan utama yaitu kelembagaan yang berkualitas dan pemerintahan yang akuntabel, disamping upaya pendukung lainnya.

- a) Kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berkualitas direncanakan dicapai dengan meningkatkan upaya mewujudkan tata kelola dan reformasi birokrasi pemerintahan; upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; upaya peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur; upaya peningkatan kapasitas

aparatur pemerintahan desa dalam mendukung implementasi undang-undang tentang desa; serta berbagai upaya terkait pengembangan kebijakan yang berperspektif gender dan pemenuhan hak anak

- b) Pemerintahan yang akuntabel dicapai dengan upaya peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif; upaya peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan; upaya peningkatan kualitas laporan keuangan dan aset daerah; serta upaya peningkatan pelayanan umum, komunikasi, dan informasi.

## **C.2. Mewujudkan pelayanan publik yang prima**

Praktek pemerintahan yang baik (*good governance*) haruslah diwujudkan di Provinsi Kalimantan Utara senyampang dengan dimulainya pemerintahan sebagai daerah otonomi baru. Budaya yang mengedepankan pelayanan prima sangat penting sejak dini ditumbuhkan sebagai nilai dasar (*values*) nilai birokrasi pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Dengan kondisi pemerintahan yang mengedepankan pelayanan prima diharapkan akan menguatkan proses percepatan pencapaian visi pembangunan daerah. Perwujudan pelayanan publik yang prima memerlukan dua upaya pembangunan utama yaitu penguatan sikap menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik, dan yang kedua peningkatan pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan yang handal disamping berbagai upaya pendukung lainnya.

- a) Menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik merupakan hal yang penting untuk ditumbuhkan dan dikembangkan di dalam birokrasi pemerintahan. Dalam mencapai kondisi ini perlu dilakukan upaya peningkatan sistem pelayanan yang prima; serta upaya pembentukan jiwa KORSA yang bersifat abdi masyarakat.
- b) Menciptakan pelayanan perizinan dan dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas proses pelayanan perizinan; upaya pengembangan regulasi pelayanan perizinan yang berkualitas.
- c) pelayanan kependudukan yang berkualitas dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kependudukan melalui pengembangan sistem data kependudukan dan meningkatkan kemampuan SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya tujuan yang masih bersifat kualitatif diuraikan menjadi berbagai sasaran yang lebih jelas indikator pencapaiannya. Sasaran dalam RPJMD merupakan rumusan keadaan yang diperlukan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan, dalam hal ini satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran dan seharusnya memperhatikan isu-isu strategis daerah. Sasaran yang baik dirumuskan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,

dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu masa jabatan kepala daerah. Karakteristik sasaran yang lain adalah harus jelas dan tidak mengandung banyak penafsiran, sedapat mungkin bisa dibuktikan atau diverifikasi pada waktu dievaluasi, dan jelas kerangka waktunya.

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 ini secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut ini,

**Tabel 5.1.**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara**

Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa									
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran					
				2017	2018	2019	2020	2021	
Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah	Angka kemiskinan	5.7%	5.1%	4.6%	4.2%	3.8%	
			Angka pengangguran	7.2%	6.6%	6,3%	6%	5.7%	
	Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau ( <i>green economy</i> )	Angka pertumbuhan ekonomi	6,00%	6,40%	6,90%	7,30%	7,70%	
			Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang	92,86%	93,60%	94,26%	94,85%	95,39%
			Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga	Persentase peningkatan kuantitas jalan yang terbangun di kecamatan perbatasan (1055,66 km)	78%	83%	88%	94%	100%
				Persentase Kabupaten/Kota yang dijangkau <i>Broadband</i>	92,8%	96,4%	100%	100%	100%
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,19	81,14	82	84,76
	Meningkatkan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka harapan lama sekolah	12,76 tahun	12,88 tahun	13,00 tahun	13,12 tahun	13,24 tahun	
			Angka rata-rata lama sekolah	9,10 tahun	9,35 tahun	9,60 tahun	9,85 tahun	10,10 tahun	
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	72,00 tahun	72,10 tahun	72,20 tahun	72,30 tahun	72,40 tahun	
Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai	Menjaga kedaulatan negara	Terjaganya keutuhan NKRI	Cakupan PLB yang dapat dijangkau	65%	67,5%	70%	72,5%	75%	
			Layanan pemerintahan sampai tingkat desa kawasan	65%	67,5%	70%	72,5%	75%	

**Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran				
				2017	2018	2019	2020	2021
			perbatasan					
		Terjaganya keamanan	Persentase gangguan keamanan	20%	19,8%	19,6%	19%	18,9%
	Membangun daerah perbatasan yang aman	Terwujudnya daerah perbatasan yang tertib dan tenteram	Persentase gangguan keamanan di perbatasan	20%	19,8%	19,6%	19%	18,9%
	Mewujudkan penegakan hukum	Terwujudnya penegakan hukum	Persentase pelanggaran perda/pergub	1%	0,8%	0,6%	0,5%	0,4%
Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel	kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase kesesuaian pengisian-struktur organisasi dengan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK)	25%	30%	40%	50%	60%
			Desa memiliki status Mandiri dalam IDM	2%	3%	4%	5%	6%
		Terwujudnya pemerintahan akuntabel	Nilai SAKIP	D	C	C	CC	B
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase layanan utama yang menggunakan teknologi informasi	0%	0%	10%	30%	50%
	Mewujudkan pelayanan publik yang prima	Menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	C	C	C	B	B
		Meningkatnya pelayanan perizinan	Persentase SKPD yang layanan utamanya menerapkan SOP sesuai <i>business process</i>	60%	65%	70%	75%	75%
Meningkatnya pelayanan kependudukan		Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	65%	75%	80%	90%	98%	